

Implementation of Government to Government Model Through E-Buddy Application (Study on Management of Incoming and Outgoing Letter Archives in Candipari Village)

[Implementasi Model Government to Government Melalui Aplikasi E-Buddy (Studi Pada Pengelolaan Arsip Surat Keluar Masuk di Desa Candipari)]

Silvana Hari Kustianingsih¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the E-Buddy application as part of the e-Government system in the Candipari Village Government, Sidoarjo. This study uses a descriptive qualitative approach with data collected through observation, interviews, and documentation, as well as purposive sampling techniques with the village head, village secretary, and heads of government sections directly related to the E-Buddy application. The data analysis method follows the interactive model of Miles & Huberman (1992), which includes systematic data collection, reduction, and presentation. The results show that the success of the system implementation is influenced by key indicators, namely communication, human resources, disposition, and bureaucratic structure. Specifically, the communication indicator shows a match in the exchange of information, but there are still obstacles in socialization and training. Human resources show suboptimal capacity and expertise, while the disposition and bureaucratic structure indicate the need for adjustments and strengthening of clear policies and SOPs. This study confirms that increasing human resource capacity, improving infrastructure, and developing integrated policies and SOPs are crucial to support the sustainability and effectiveness of the E-Buddy application implementation at the village level.*

Keywords - Implementation; E-Government; e-buddy

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi E-Buddy sebagai bagian dari sistem e-Government di Pemerintah Desa Candipari, Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik purposive sampling terhadap kepala desa, sekretaris desa, dan kepala seksi pemerintahan yang terkait langsung dengan aplikasi E-Buddy. Metode analisis data mengikuti model interaktif Miles & Huberman (1992), yang meliputi pengumpulan, reduksi, dan penyajian data secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem dipengaruhi oleh indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara spesifik, indikator komunikasi menunjukkan adanya kesesuaian dalam pertukaran informasi, namun masih terdapat hambatan dalam sosialisasi dan pelatihan. Sumber daya manusia menunjukkan kapasitas dan keahlian yang belum optimal, sedangkan disposisi dan struktur birokrasi menunjukkan perlunya penyesuaian dan penguatan kebijakan serta SOP yang jelas. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, serta pengembangan kebijakan dan SOP yang terintegrasi sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas implementasi aplikasi E-Buddy di tingkat desa.*

Kata Kunci - Implementasi; E-Governmen; e-buddy

I. PENDAHULUAN

Kegiatan administrasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam dunia kerja atau organisasi, khususnya pada pemerintahan atau lembaga pemerintahan. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa ketatausahaan adalah bagian keseluruhan dari proses administrasi, dengan demikian ketatausahaan sangatlah penting untuk membantu suatu pekerjaan dalam organisasi contohnya yaitu kegiatan surat menyurat seperti pemrosesan surat masuk dan surat keluar yang didalamnya terdapat penerimaan, pencarian, pendistribusian serta pengarsipan dokumen yang dianggap penting bagi organisasi tersebut. Seiring berjalannya waktu, teknologi informasi semakin maju dan dapat memudahkan tenaga manusia dalam menjalankan tugas apapun. Hal ini sesuai dengan Instruksi

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan E-Government [1]. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan, dan penyebaran informasi. E-Government berguna untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui pertukaran informasi. Dalam mewujudkan keterbukaan, kemudahan akses serta keterpaduan akses informasi antar pemerintah, pemerintah harus memperbaiki diri untuk mengembangkan sistem administrasi publik berbasis internet yang baik, efektif, transparan dan efisien, khususnya melalui penerapan E-Government melalui penerapan SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) atau aplikasi Pencatatan publik elektronik yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menpan RB No. 6 Tahun 2011 mengenai panduan dasar Tata Naskah Dinas berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintahan [2]. Sedermayanti menegaskan bahwa Naskah Dinas Elektronik adalah pengelolaan melalui platform yang disimpan dalam sistem dan diakses melalui perangkat elektronik yang terhubung ke koneksi internet [3].

Mengingat pentingnya surat dinas, maka perlu adanya perhatian khusus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja OPD. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan sistem digitalisasi dimana informasi akan disajikan dalam format elektronik dengan menggunakan media elektronik. Untuk memenuhi tujuan E-Government seperti yang ditulis Kusnadi & Ma'ruf ialah menghubungkan jaringan komunikasi antara warga negara, pelaku swasta, dan pemerintah lainnya untuk memfasilitasi interaksi, transaksi, dan layanan [4]. Lebih lanjut, e-Government bertujuan untuk meningkatkan kemampuan warga negara dalam menggunakan layanan publik yang disediakan oleh lembaga pemerintah, mengurangi jumlah masyarakat yang bertikai, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh seluruh warga negara. Contohnya seperti aplikasi E-Office yang terdapat di Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan salah satu contoh wujud digitalisasi administrasi atau pengarsipan yang awalnya dilakukan secara manual sebelum dilakukan secara elektronik [5]. Selain itu, Sinda merupakan kemajuan atau terobosan teknologi dalam Sistem Persuratan Provinsi Kalimantan Selatan [6].

Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Naskah Dinas Elektronik Smart City Kabupaten Sidoarjo yang saat ini diterapkan oleh pemerintah Sidoarjo. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. E-buddy adalah sistem surat menyurat yang merupakan produk sampingan dari E-Government G2E (Koordinasi pemerintah dan pegawai adalah jenis e-pemerintah yang mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan pertukaran informasi dan layanan antara pemerintah dan entitas terkait pemerintah). Salah satu aplikasi yang dirancang untuk mengelola ASN yang hadir di OPD Kabupaten Sidoarjo disebut e-buddy Sidoarjo [7]. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan antara karyawan dan peserta serta bertukar informasi tentang kegiatan. Disposisi adalah informasi yang diberikan kepada anggota staf atau unit mengenai pengiriman, penerimaan, dan aktivitas online.



Gambar 1: Halaman Aplikasi E-Buddy Sidoarjo
Sumber : Website e-buddy.sidoarjokab.go.id (2024)

Penerapan e-buddy sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kearsipan Elektronik Umum berkaitan dengan kemajuan e-Government pada Sistem Sidoarjo [8]. Sebelum tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih menggunakan komunikasi manual, instruksi pemesanan, pencatatan kehadiran, atau sistem berbasis kertas. Dalam perkembangan E-Government dalam Peraturan Daerah Kabupaten, Pemerintah mengganti sistem kertas dengan media elektronik. Hal ini mencakup ketidakhadiran pejabat negara,

penerimaan, pengiriman, dan perintah penangkapan (perintah) surat. Karena beragamnya penerapannya, segala aktivitas senantiasa berubah akibat pengaruh teknologi informasi dan komunikasi.

Secara konsep implementasi diartikan sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan (Nugroho dalam Public Policy Implementasi adalah kegiatan yang diperlukan selalu berkesinambungan.[9] Implementasi pada kebijakan undang-undang diperlukan karena pada halaman tersebut diharapkan untuk melihat “kesesuaian ” dari berbagai faktor penentu keberhasilan undang-undang atau program tersebut. Tujuan pelaksanaan kebijakan dan realisasinya terkait dengan hasil kebijakan dari pemerintah. Implementasi dari setiap program tertentu dapat berjalan dengan efektif jika direalisasikan oleh pelaksana yang sesuai proses yang disebut tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang individu, sekelompok orang, atau bahkan seluruh pemerintah. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah diidentifikasi sebagai hal yang diperlukan dalam implementasi kebijakan menurut Edward III dipengaruhi oleh empat variabel, yang pertama Komunikasi yaitu proses pertukaran pesan yang melibatkan pengiriman, penerimaan dan interpretasi informasi yang penting untuk mencapai tujuan, yang kedua Sumberdaya yaitu mencakup semua elemen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, yang ketiga Disposisi yaitu merujuk pada sikap dan perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan tugas, dan yang keempat Struktur Birokrasi yaitu cara organisasi diatur termasuk pembagian tugas, kewenangan dan hubungan.[10]

Salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang mengimplementasikan e-buddy adalah Kecamatan Porong. Dalam hal surat pengelolaan, ada tiga jenis surat: masuk, keluar, dan disposisi. [11] Aparat Pemerintah Desa Candipari memiliki akun e-buddy pribadi. Kasi Pemerintahan yang bekerja sebagai pengelola e-buddy di Pemerintah Desa Candipari menjelaskan prosedur pelaksanaan operasional e-buddy. Khusus jika ada surat masuk dari OPD ke Pemerintah Desa Candipari, maka surat tersebut otomatis terkirim ke akun e-buddy Pemerintah Desa Candipari. Apabila terdapat surat masuk dari OPD atau instansi lain yang tidak tercantum dalam Pengirim OPD, admin dapat mengubah atau membuat fitur surat masuk baru yang dilanjutkan dengan verifikasi identitas sesuai surat yang diperoleh. Setiap aparat dapat menyusun surat keluar dengan template yang dapat diunduh dengan file dengan ekstensi .docx di aplikasi e-buddy dan pengguna dapat menggunakan Microsoft Word untuk mengubah konteks surat sesuai dengan rencana surat yang akan dibuat. Dalam kegiatan surat keluar, surat harus berekstensi .docx agar dapat diunggah ke e-buddy yang minimal berisi nomor dan qr code untuk tanda tangan elektronik sesuai format surat e buddy. Kemudian jika ada surat yang memerlukan disposisi, maka yang meneruskan surat kepada pimpinan adalah admin.

Kasi Pemerintahan juga menjelaskan bahwa saat menggunakan aplikasi e-buddy untuk disposisi surat, administrator tidak memberikan informasi surat dinas sebanyak mungkin melalui e-buddy kepada orang yang bersedia meneruskannya yaitu kepala desa. Dikarenakan implementasi penggunaannya masih belum paham secara maksimal dan keterbatasan kemampuan yang masih belum mampu beradaptasi. Akibatnya, pemrosesan surat menjadi lebih lambat dan membutuhkan banyak waktu. Mengingat pentingnya surat disposisi bagi organisasi, hal ini harus dilakukan dengan cepat agar gagasan yang tertuang dalam surat dapat terlaksana sesegera mungkin.

Tabel 1. Pengelolaan surat pada akun E Buddy Desa Candipari

No	Tahun	Surat Masuk	Surat Keluar	Disposisi Oleh Kasi Pemerintahan
1	2021	14	1	14
2	2022	226	225	226
3	2023	270	257	270
4	2024	274	249	274

Sumber : diolah dari Pemerintah Desa Candipari, 2024.

Berdasarkan Tabel 1, Pemerintah Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo telah aktif menggunakan aplikasi e-buddy sejak tahun 2021 dalam kegiatan surat yang melibatkan dinas. Berdasarkan Tabel 1 terdapat banyak surat dinas yang dimulai pada tahun 2021 dan berlanjut hingga tahun 2022, tetapi tidak banyak yang dihapus. Pada tahun 2023 - 2024, surat keluar untuk balasan surat juga telah mulai aktif menghapus surat tetapi masih mengalami kesulitan. Oleh karena itu, penerapan memiliki peran penting di semua tahapan proses suatu penerapan tertentu harus dilaksanakan untuk memberikan efek dan hasil yang diinginkan. Tanggung jawab, yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang, terdiri dari penetapan program-program yang telah dibuat dan disetujui melalui komentar publik. Teori kebijakan George Edward III, implementasi merupakan

proses yang penting. Oleh karena itu, ada empat faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu penerapan, termasuk komunikasi, faktor sehari-hari, disposisi, dan struktur birokrasi.

Namun berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa permasalahan yang dijelaskan oleh Kasi Pemerintahan yaitu admin e-buddy, pertama Pemerintah Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sebelum adanya e-buddy dalam pengelolaan surat dinas sebelumnya masih dilakukan secara manual apabila ada surat masuk atau surat keluar maka surat tersebut akan ditulis dalam agenda lalu data-data tersebut disimpan dilemari arsip, untuk itu membutuhkan tempat yang cukup besar untuk penyimpanan data, dan membutuhkan waktu yang lama untuk mencari data yang dibutuhkan kembali. Permasalahan kedua server down (gangguan server) yaitu aplikasi sering mengalami downtime terutama pada saat jam kerja, dan permasalahan yang ketiga yaitu keterlambatan disposisi surat keluar yang membutuhkan tanda tangan kepala desa, sehingga harus mengingatkan secara lisan kepada kepala desa

Beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai penerapan e-Government, Yang pertama adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Khofifatul Ummah tentang Implementasi E-Government Melalui Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) (Studi Kasus di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo) [12]. menunjukkan bahwa meskipun aplikasi tersebut telah dilaksanakan, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Terutama dalam hal transmisi surat dinas melalui aplikasi E-Buddy, khususnya dalam hal pendisposisian surat belum dimanfaatkan dengan optimal. Penelusuran disposisi surat masih dilakukan melalui chat WhatsApp, bukan pada aplikasi E-Buddy. Selain itu, masih ada beberapa pegawai desa yang sebagai pengguna aplikasi E-Buddy masih belum sepenuhnya terbiasa dalam menggunakannya. Beberapa pengguna juga masih mengalami kesulitan dalam pembuatan surat dan seringkali admin yang membuat surat melalui akun pegawai tersebut. Sikap beberapa pegawai desa yang kurang responsif juga dapat dilihat dari respon Kepala Desa terhadap disposisi surat yang tidak selalu mengetahui dan membaca surat atau disposisi surat melalui aplikasi E-Buddy. Dalam jurnal penelitian, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Dalam penelitian kedua “Implementasi Pengelolaan Surat Dinas Berbasis Digital Melalui Aplikasi E-Buddy Sidoarjo di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon” yang dilakukan oleh Mukhammad Ulil Albab [13] mengungkapkan bahwa penggunaan aplikasi E-Buddy Sidoarjo masih menemui kendala terutama dalam sistem pendisposisian surat masuk yang lebih memanfaatkan fitur Chatting melalui aplikasi Whatsapp Grup, beberapa faktor diketahui dapat mempengaruhi hal tersebut diantaranya kurangnya kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknis secara merata terhadap para pengguna aplikasi E-Buddy Sidoarjo dan kualitas sumber daya manusia yang kurang kompeten. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Di sisi lain, kajian atau penelitian ketiga yang dilakukan oleh Difta Izza Nadila [14] tentang penerapan E-Government melalui aplikasi Tata Surat Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus di Pemerintahan Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo) mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Pertama, Indikator Infrastruktur Legal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait naskah dinas elektronik di lingkungan instansi pemerintahan. Di sisi lain, terdapat beberapa perangkat desa di Infrastruktur Manusia yang kurang ideal dalam penggunaan aplikasi E-Buddy karena belum ada surat keluar yang diambil melalui aplikasi, dan terdapat pula beberapa surat keluar yang diambil melalui Personal Chat yang kurang ideal dikarenakan keterbatasan kemampuan desa dalam beradaptasi. Ketiga, sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tersebut sudah terbangun, meliputi komputer dan printer di setiap wilayah yang beroperasi, serta WiFi yang stabil untuk proses penyaluran surat. Oleh karena itu, agar E-Buddy dapat digunakan seefektif mungkin, maka perlu dilakukan peningkatan kemampuan desa dalam menggunakan aplikasi tersebut dan mengoptimalkan penggunaannya dalam surat pendisposisian dan surat penyampaian. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, penerapan aplikasi E-Buddy di Glagaharum dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk memilih lokasi penelitian di Pemerintah Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo karena ingin memahami bagaimana penerapannya dalam studi surat dinas di Pemerintah Desa Candipari. Oleh karena itu, penulis merangkum permasalahan tersebut dalam sebuah tulisan berjudul “Implementasi Model Government to Government Melalui Aplikasi E-Buddy (Studi Pada Pengelolaan Arsip Surat Keluar Masuk di Desa Candipari)”.

II. METODE

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, menganalisis, dan mendeskripsikan “Implementasi aplikasi E Buddy di Desa Candipari” dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berguna untuk memahami fenomena yang berhubungan dengan apa yang sedang diteliti oleh subjek penelitian.[15] Lokasi penelitian berada di Desa Candipari, Porong, Kabupaten Sidoarjo. Fokus

utama penelitian adalah pada teori implementasi George Edward III dengan indikator komunikasi, sumber daya sehari-hari, disposisi, dan struktur birokrasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan percakapan dengan individu yang terlibat dalam implementasi aplikasi E-Buddy. Sedangkan Sumber Data Sekunder mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, dan situs web yang berhubungan langsung dengan penelitian implementasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Berdasarkan kebutuhan spesifik, dapat memberikan wawasan tentang masalah yang ditemui selama penelitian. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Seksi Pemerintahan di Pemerintah Desa Candipari yang memiliki keterkaitan langsung dengan aplikasi E-Buddy. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan pengumpulan data dokumen pendukung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman (1992: 16), yaitu (1) data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya, (2) reduksi data mengacu pada pemilihan, proses penarikan perhatian, dan transformasi data kasar berdasarkan data tertulis yang dilakukan di laboratorium untuk mendapatkan data penting yang berkelanjutan dan kemudian membuat data yang tidak tersedia atau diperlukan. Selanjutnya, (3) Penyajian data adalah proses mengubah semua informasi yang diperoleh dari pengumpulan data ke dalam format yang mudah diakses atau diambil. Dengan demikian, dapat lebih mudah untuk melakukan kajian keseluruhan. Dan yang terakhir (4) Kesimpulan adalah semua data yang dikumpulkan sesuai dengan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.[16]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi E-Government melalui aplikasi Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) pada Pemerintah Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dibahas dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teori implementasi George Edward III sebagaimana dikemukakan dalam [17], untuk menilai implementasi program. Menurut teori ini, ada beberapa indikator yang berdampak pada pelaksanaan program, antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi struktur. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi aplikasi E-Buddy pada Pemerintah Desa Candipari, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo [18].

1. Komunikasi

Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kebijakan publik. Dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan, komunikasi harus menjadi prioritas karena komunikasi dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak yang terlibat [19]. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk mengkoordinasikan pelaksanaan rencana [20]. Menurut Edward III, inisiatif kebijakan publik akan berhasil apabila terdapat komunikasi yang efektif antara peserta program dengan otoritas terkait. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran program dapat dianalisis dengan baik sehingga dapat diketahui penyimpangan atau saran terhadap kebijakan tersebut. Komunikasi yang efektif memiliki beberapa dimensi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi [21].

Menurut Dimensions Transmisi, setiap program harus dijelaskan secara jelas agar khalayak dapat memahami dan menghayati maksud dan tujuannya. Sebelum keputusan dan perintah dibahas, kebijakan dan perintah-perintah harus dikomunikasikan atau diterima oleh peserta. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ediyanto pada tahun 2021 dengan judul "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua" yang menghasilkan kesimpulan bahwa komunikasi ini efektif dalam satu hal, yaitu dengan mengalihkan kebijakan ke pelaksanaan kebijakan [22]. Pentingnya penyampaian informasi dalam keberhasilan implementasi program dan kebijakan tidak dapat dilebih-lebihkan. Selama proses implementasi, pengumpulan informasi yang akurat dan jelas memastikan bahwa pelaksana memahami kebijakan yang akan diterapkan dengan baik dan adil. Hal ini penting agar program berjalan lancar dan memberikan bantuan yang bermanfaat bagi semua orang. Informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat memengaruhi pemahaman pelaksana terhadap kebijakan yang akan diterapkan, yang pada akhirnya akan memengaruhi pelaksanaan program dan hasil yang diberikan kepada masyarakat.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi program dan kebijakan, diperlukan proses transfer informasi atau penyampaian informasi kebijakan yang efektif kepada implementator. Pelaksana harus memahami kebijakan yang akan digunakan secara jelas dan tepat guna memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Salah satu tindakan yang dapat diambil adalah mengkomunikasikan informasi kebijakan kepada para implementator dengan cara yang jelas dan ringkas. Selain itu, pelatihan dan pendidikan juga diperlukan agar pegawai dapat memahami aplikasi atau alat yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan eBuddy.

"Dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat jarang sekali memberikan informasi terkait penggunaan aplikasi eBuddy, seingat saya hanya pertama saja saat aplikasi ini diluncurkan lebih banyak secara online," demikian hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Candipari. Wawancara 27 Februari 2025



Gambar 2. Sosialisasi penggunaan Aplikasi Ebuddy Tahun 2020

Sumber: Youtube Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan pernyataan dan gambar di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelatihan atau live streaming YouTube kurang efektif dalam meningkatkan pemahaman para pelaksana terkait pelaksanaan tugas terkait aplikasi ebuddy. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan kebijakan yang dilaksanakan di Desa Candipari.

“Sebagai penanggung jawab aplikasi, masih kurang paham jika aplikasi ebuddy mengalami kendala,” ungkap Kasi Pemerintahan dalam Wawancara (27 Februari 2025)

terkait hal tersebut. Sebab, belum ada pendampingan dalam mengatasi permasalahan yang ada di aplikasi tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka diperlukan peningkatan kapasitas penyampaian informasi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang cara penggunaan Aplikasi Ebuddy dan cara penyelesaian permasalahan yang timbul.

George Edward III dalam Dimensi Kejelasan menyatakan bahwa apabila suatu kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, maka petunjuk pelaksanaan tidak dapat begitu saja dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan tersebut, komunikasi tentang hal tersebut juga harus jelas [23]. Oleh karena itu, komunikasi harus jelas dan bebas dari hambatan yang menghambat pelaksanaan tugas, serta diperlukan keakuratan dan ketepatan waktu informasi. Oleh karena itu, pengguna aplikasi E-Buddy tidak perlu khawatir ketika terjadi kendala dalam pelaksanaannya. Misalnya seperti yang telah dijelaskan oleh Kaur Pemerintahan sekaligus operator E-Buddy.

“Apabila mengalami kendala, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menonton video yang tersedia di YouTube pada acara sosialisasi pertama, kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi teknis yang dilakukan secara daring oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, ada bimbingan teknis dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan secara tatap muka, namun bimbingan teknis ini tidak dilakukan secara berkala”. Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 27 Februari 2025.

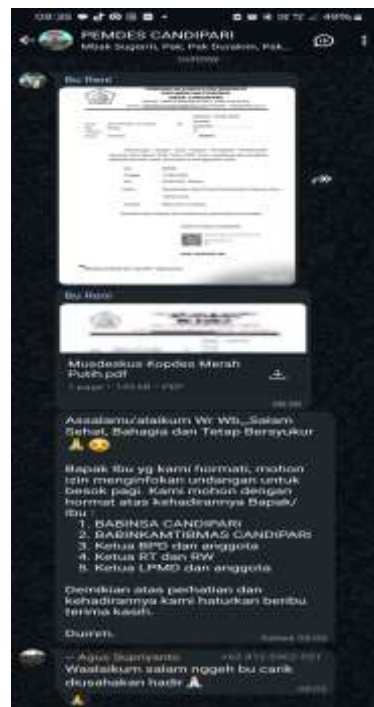
Berdasarkan hasil wawancara di atas terdapat fitur online dan bimbingan teknis dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan tatap muka bimbingan teknis dari Kecamatan Porong. Namun bimbingan teknis belum terlaksana secara teratur. Demikianlah gambaran FGD teknologi e-buddy di Buduran Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 3. Undangan FGD teknis e-buddy Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Pemerintah Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (2025).

Berdasarkan gambar 3, menunjukkan bahwa surat undangan dari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan untuk Sekretaris dan Admin Desa yang ada di Kecamatan Sidoarjo. Dalam rangka menghadiri FGD teknis e-buddy secara tatap muka yang diadakan di ruang rapat kantor Kecamatan Porong Sidoarjo, pada tanggal 27 Juni 2023. Dengan adanya surat tersebut membuktikan bahwa sudah dilakukan bimbingan teknis terkait implementasi aplikasi e-buddy namun masih belum dilakukan secara teratur.

Indikator ketiga adalah konsistensi, informasi yang diberikan dalam pelaksanaan tugas harus jelas dan konsisten (dapat diterapkan atau diinisiasi). Dengan demikian, jika instruksi sering tidak jelas, hal itu dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan hal tersebut, implementasi aplikasi E-Buddy untuk surat dinas di Pemerintah Desa Candipari masih kurang konsisten dalam hal surat masuk, keluar surat, dan disposisi. Akibatnya, terkadang surat masuk tidak menjelaskan cara menggunakan aplikasi E-Buddy, termasuk penggunaan aplikasi WhatsApp. Berikut contoh chat WhatsApp untuk surat dinas Pemerintah Desa Candipari.



Gambar. 4 Chat WhatsApp penyampaian surat di Pemerintah Desa Candipari
Sumber : Pemerintah Desa Candipari (2025)

Berdasarkan Gambar 4 dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyampaian surat lebih banyak dilakukan melalui WhatsApp group dikarenakan penggunaan aplikasi e-buddy yang masih belum terlalu tinggi. Hal ini cukup meresahkan dan dapat mengakibatkan penyampaian surat tidak konsisten. Istilah pemahaman mengacu pada hasil hubungan sosial seseorang dengan orang lain. Komunikasi diartikan sebagai proses dimana seorang individu mengirimkan suatu pesan kepada orang lain, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, atau tidak sama sekali, melalui media apapun dengan tujuan untuk menginformasikan atau menyampaikan informasi, ide, sikap, atau tindakan.[24] Temuan penelitian ini didasarkan pada hasil observasi bahwa implementasi aplikasi e-buddy di Pemerintah Desa Candipari telah selesai. Namun demikian, masih terdapat permasalahan seperti dukungan teknis yang kurang bisa diandalkan dan informasi surat yang tidak konsisten melalui aplikasi e-buddy, yang dapat dikaitkan dengan masih banyaknya orang yang menggunakan WhatsApp.

Permasalahan diatas juga terjadi pada penelitian yang berjudul “Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) (Studi Kasus di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)”. Dalam jurnal penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penelitian belum berjalan secara optimal, terbukti dari berbagai indikator komunikasi, aktivitas sehari-hari, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian sebelumnya juga membahas tentang implementasi aplikasi E-Buddy di sektor Pemerintahan desa.

2. Sumber Daya

Salah satu indikator yang mempunyai dampak signifikan terhadap proses implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya kapasitas dan keahlian yang baik juga akan membantu pemerintah dalam menangani dan melaksanakan kebijakan dengan baik karena setiap sumber daya kapasitas akan dibandingkan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan. Indikator sumber daya yang diuraikan Edward III antara lain sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya anggaran, dan wewenang. Namun disini peneliti hanya menggunakan sub indikator sumber daya manusia, sumber daya peralatan, dan kewenangan.

Sumber Daya Manusia, Sumber daya manusia merupakan unsur organisasi dan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena faktor utama dalam implementasi kebijakan adalah statistik, maka salah satu penyebab utama kegagalan dalam proses ini adalah adanya kekurangan, dan ketidaksempurnaan sumber daya manusia dalam bidangnya [25]. Sebaliknya apabila sumber daya manusia dikembangkan dengan baik, maka implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan ideal [26]. Untuk melaksanakan kegiatan surat menyurat dinas dalam aplikasi E-Buddy, diperlukan sumber daya manusia yang mandiri. Pemerintahan Desa Candipari dijalankan oleh operator yang memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Kasi Pemerintahan.

“Sebagai Kasi Pemerintahan, saya sebagai pelaksana sangat berkeinginan untuk menggunakan akun e-buddy Desa Candipari. Namun, terkadang saya mengalami kendala ketika menggunakan aplikasi e-buddy elektronik. Selain itu, ada beberapa instansi pemerintah Candipari yang belum aktif menggunakan aplikasi e-buddy untuk meneruskan email ke akun mereka. Karena beberapa pejabat di pemerintahan Desa Candipari belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.” Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 27 Februari 2025.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa SDM Sumber Daya di Pemerintah Desa Candipari masih belum mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya optimal dalam mengimplementasikan aplikasi e-buddy.

Sumber Daya Peralatan, Setiap organisasi perlu memiliki fasilitas yang efisien dan berkualitas tinggi, hal ini dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Infrastruktur berfungsi sebagai elemen pendukung untuk memfasilitasi koordinasi aktivitas kerja dengan tujuan menyelesaikan setiap masalah yang timbul selama proses berlangsung [27]. Mengenai fitur pengembangan aplikasi e-buddy Kasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa.

“Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Candipari cukup lengkap, yaitu komputer, keyboard, mouse, CPU, printer, AC, dan koneksi internet. Namun, jika terjadi kendala atau masalah pada internet, maka akan menyebabkan kendala pula dalam proses surat menyuratnya.” Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 27 Februari 2025.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pengelola e-buddy yang akrab disapa Kasi Pemerintahan ini menyatakan bahwa meskipun fasilitas yang tersedia sudah cukup baik, namun apabila terjadi kendala pada internet tidak selalu mudah untuk diatasi karena respon yang diberikan dalam kegiatan surat menyurat masih tergolong lambat.

Tabel 2. Pengelolaan akun E Buddy Desa Candipari

No	Nama Aplikasi	Penanggungjawab	Pelaksana
1	E-Buddy	Sekretaris Desa	Admin

Sumber : diolah dari Pemerintah Desa Candipari

Berdasarkan hasil dari wawancara dan tabel 2, Kasi Pemerintahan sekaligus admin merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam implementasi aplikasi e-buddy. Dalam hal pengimplementasian e-buddy, Tugas Kasi Pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab untuk menerima dan memproses surat masuk, mendisposisi surat, dan membuat surat keluar bagi seluruh instansi OPD Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak sembarang orang yang bertanggung jawab atas aplikasi e-buddy.

Menurut Edward III, yang berwenang adalah hak dan tanggung jawab pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan secara politik. Sehubungan dengan implementasi aplikasi e-buddy di Desa Candipari yang dilakukan berdasarkan wawancara pada tanggal 27 Februari 2025, sekretaris Desa mengungkapkan bahwa

“Untuk kewenangannya, kami berpegang pada Peraturan Bupati Sidoarjo No. 98 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pengelola aplikasi e-buddy di Pemerintah Desa Candipari adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Sesuai peraturan tersebut, akan tetapi di Desa Candipari yang mengelola aplikasi e-buddy yaitu Kasi Pemerintahan, karenan ada kekosongan jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum,

pengelola wajib memberikan informasi tentang surat masuk dan surat pendisposisian kepada perangkat desa lain, namun tidak hanya itu, pengelola juga bertanggung jawab membuat surat keluar untuk seluruh OPD Kabupaten Sidoarjo.”

Dimensi sumber daya meliputi jumlah pegawai dan tingkat kinerjanya. Efektivitas program akan menurun apabila kuantitas dan kualitas tidak sesuai standar, karena mereka tidak mampu melaksanakan tugasnya secara efektif [28]. Temuan penelitian ini berdasarkan pengamatan bahwa operator pada aplikasi e-buddy di Pemerintah Desa Candipari, Kasi Pemerintahan, masih belum mampu melaksanakan tugasnya secara efektif. Subindikator sumber daya sudah dikembangkan, namun sebagian besar masih ada kendala di internet, sedangkan subindikator kewenangan sudah terlaksana dengan baik, dengan mematuhi Peraturan Bupati Sidoarjo No. 95 Tahun 2022 agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Khofifatul Ummah dan Ilmi Usrotin Choiriyah pada tahun 2023 dengan judul Implementasi E-Government Melalui Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) (Studi Kasus di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo). Hasil penelitian pada sub indikator indikator sumber daya manusia menunjukkan bahwa akun E-Buddy Desa Kajeksan dimiliki oleh Kaur TU, dan pengguna lainnya adalah Aparatur Desa lainnya. Sub indikator sumber daya peralatan menyatakan bahwa komputer, keyboard, mouse, CPU, dan printer juga hadir selama pengoperasian aplikasi e-buddy. Sedangkan sub indikator kewenangan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang dilaksanakan oleh admin E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan berwenang dan mempunyai beberapa tugas sebagai penanggungjawab akun E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan yang berkaitan dengan penerimaan surat masuk, surat keluar, dan penerusan surat dinas.

3. Disposisi

Menurut Edward III, disposisi adalah kemampuan, keinginan, dan kemauan untuk melaksanakan suatu tugas guna menyelesaikan tugas tertentu dengan menentukan tujuannya. Indikator disposisi dalam implementasi terdiri dari birokrat dan insentif. Data kecukupan terti pemberian insentif agar para pelaksana semangat bekerja secara totalitas ditunjukkan pada indikator ini.

Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Candipari pada tanggal 27 Februari 2025, pengangkatan birokrat merupakan suatu proses yang sangat penting dalam organisasi karena akan menentukan produktivitas kerja dari sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi [29]. Pernyataan ini diawali dengan penjelasan Kepala Desa Candipari pada tanggal 27 Februari 2025 sebagai berikut :

“Hak Kepala Desa adalah pengangkatan birokrasi untuk menjadi Perangkat Desa di Pemerintah Desa Candipari, Setiap pengangkatan birokrasi, selalu ada kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan, dan kami mengacu pada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2. Salah satu isinya yaitu mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah kewenangan Kepala Desa”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa mematuhi UU Desa Pasal 26 ayat 2. Oleh karena itu, penyempurnaan dilakukan dengan memperhatikan detail-detail penting sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan personel yang kompeten dan dapat membantu organisasi menjadi lebih baik.

Insentif, Insentif merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi sikap pada saat proses implementasi. Respon dan eksekusi implementasi aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Candipari dapat diamati. Hasil penelitian ini menjelaskan beberapa aspek implementasi e-buddy, yaitu: untuk surat masuk, yang dapat dilakukan hanya oleh pengurus e-buddy atau Kasi Pemerintahan. Setelah surat dikirim ke ASN lain, ASN dapat memeriksa surat yang telah dikirimkan, dan Kasi Pemerintahan dapat meneruskan surat yang telah dikirimkan kepada pihak terkait. Kasi Pemerintahan juga dapat membuat surat keluar dengan mengunduh template yang telah tersedia di aplikasi e-buddy. Apabila ada surat yang perlu ditandatangani oleh pimpinan, maka dapat dilakukan secara elektronik sehingga proses surat menyurat dapat diselesaikan dengan cepat. Perlu diterapkan strategi pemberian insentif agar proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengaruh kepada pegawai sehingga dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam suatu organisasi. Berikut ini adalah penjelasan dari Kepala Desa

“Aparatur desa yang berprestasi tentunya akan memberikan insentif atau disebut reward yang akan memacu aparatur untuk melaksanakan kegiatan pelayanan agar mencapai kualitas pelayanan yang baik. Insentif atau Reward diberikan kepada aparatur dengan tujuan untuk memotivasi mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 27 Februari 2025, dapat disimpulkan bahwa implementasi sangatlah penting, karena dengan begitu para implementor dapat meningkatkan semangat kerjanya dan memastikan pekerjaannya dapat terlaksana dengan baik.

Hasil penelitian berdasarkan persepsi indikator disposisi Pemerintah Desa Candipari sudah berjalan seefisien mungkin, mungkin sama dengan UU Desa yang menaati peraturan yang ada dan tidak melanggar aturan yang ada. Selain itu, untuk memperoleh mutu pelayanan yang baik, perlu adanya pemberian insentif atau reward kepada pegawai agar termotivasi dan tekun bekerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Andika Putra yang menyatakan bahwa kerjasama organisasi atau pimpinan sangat penting dalam mencapai tujuan yang efektif. Contohnya adalah dengan menetapkan program sebagai prioritas utama dalam kegiatan dan memastikan bahwa staf terlatih dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiar Fitri Dewi dengan judul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (Simbg) Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Palangkaraya. Berdasarkan temuan penelitian, Pelayanan secara otomatis akan menjadi termotivasi jika pegawainya mendapat imbalan atas kerja keras dan inovasinya dalam meningkatkan standar kerjanya.

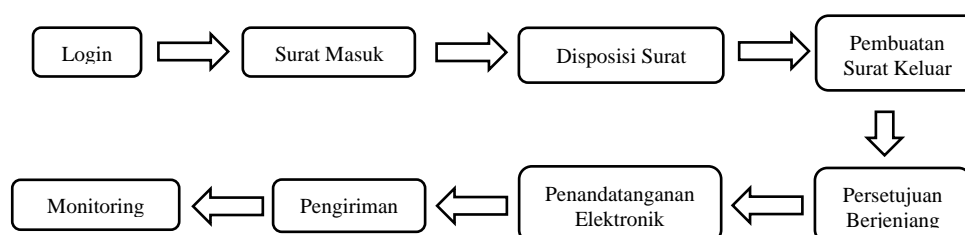
4. Struktur Birokrasi

Variabel terakhir dalam teori implementasi Edward III adalah struktur birokrasi. Cara paling efektif untuk melaksanakan kegiatan secara komprehensif adalah melalui struktur birokrasi. Birokrasi tidak hanya ada di lembaga pemerintah tetapi juga di organisasi swasta. Berdasarkan hal ini, pemahaman tentang birokrasi merupakan komponen mendasar dalam mengajarkan implementasi kebijakan publik. Dua komponen utama dari struktur birokrasi adalah SOP dan fragmentasi.

Standar Operasional Prosedur, atau SOP, merupakan evolusi dari pencatatan waktu internal, sumber daya, dan persyaratan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan berskala besar sehingga proses operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien. Terkait SOP, hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan menunjukkan bahwa.

“Belum ada SOP khusus dalam penerapan aplikasi e-buddy, namun Pemerintah Desa Candipari tetap mengikuti pedoman yang sudah ada dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020”.

Berdasarkan wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Candipari sudah sesuai dengan Perbup Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik yang sudah berlaku. Fragmentasi, Fragmentasi adalah hubungan dua arah yang mencakup struktur variabel pejabat. Fragmentasi juga menghambat implementasi rencana. Fragmentasi adalah tanggung jawab suatu kebijakan tertentu antara berbagai entitas yang memerlukan koordinasi. Jalannya proses surat keluar masuk di Aplikasi E-Buddy Desa Candipari berdasarkan struktur birokrasi Edward III, Implementasi pengelolaan surat keluar masuk sebagai berikut.



Gambar. 5 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Candipari

Sumber : Pemerintah Desa Candipari

Berdasarkan Gambar 5, struktur organisasi pemerintahan Desa Candipari menjelaskan bagaimana jalannya proses surat keluar masuk di aplikasi E-Buddy Sidoarjo, teori Edward III ini termasuk struktur birokrasi karena proses tersebut terjadi dalam kerangka birokrasi pemerintahan yang terstruktur secara digital, melibatkan berbagai tingkatan pejabat dan admin, serta mengandalkan mekanisme disposisi dan komunikasi birokrasi yang terintegrasi secara elektronik. Dengan kata lain, implementasi aplikasi E-Buddy ini dapat dianalisis sebagai penerapan kebijakan dalam struktur birokrasi yang mengatur alur dan manajemen surat menyurat secara digital, sesuai variabel yang diuraikan dalam teori Edward III.

Struktur pemerintahan dipengaruhi oleh kebutuhannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi nasional. Hal ini biasanya dinyatakan sebagai bentuk pemerintahan kekuasaan yang dilaksanakan melalui penerapan struktur organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik dan pola koordinasi yang dilakukan dalam rangka menetapkan bupati

sebagai pemegang kewenangan terpenting, keduanya sesuai dengan hasil kajian berdasarkan wawancara terkait indikator Struktur Birokrasi. Penelitian ini sejalan dengan temuan Khofifatul Ummah yang berjudul Implementasi E-Government Melalui Pemanfaatan E-Buddy (Studi Kasus di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo). Temuan penelitian menunjukkan bahwa SOP penerapan e-buddy di Pemerintah Desa Kajeksan juga didasarkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo No. 30 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik yang menyatakan bahwa pelaksanaan dinas dinas elektronik dilakukan dengan menggunakan aplikasi surat elektronik.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Model Government to Government Melalui Aplikasi E-Buddy (Studi Pada Pengelolaan Arsip Surat Keluar Masuk di Desa Candipari), dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem E-Government melalui aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Candipari, Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan administrasi desa. Namun, keberhasilan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan utama, seperti kurangnya pelatihan dan pemahaman pengguna, kendala infrastruktur seperti koneksi internet yang tidak stabil, serta kurangnya SOP khusus yang mengatur penggunaan sistem secara rinci. Selain itu, faktor komunikasi dan koordinasi antar bagian perlu diperkuat agar proses implementasi berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, sosialisasi yang lebih intensif, serta pengembangan kebijakan dan SOP yang komprehensif sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas sistem E-Buddy. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem ini dapat berjalan secara optimal, mendukung reformasi birokrasi berbasis teknologi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. penulis telah berhasil menyelesaikan artikel dengan judul "Implementasi Model Government to Government Melalui Aplikasi E-Buddy (Studi Pada Pengelolaan Arsip Surat Keluar Masuk di Desa Candipari)". Saya juga ingin menyampaikan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penelitian ini berlangsung. Pertama-tama, Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Candipari, khususnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Seksi Pemerintahan yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi berharga terkait implementasi aplikasi E-Buddy di desa. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga dan sahabat yang selalu memberikan motivasi, doa, serta dukungan moril sehingga saya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan penuh semangat dan dedikasi.

REFERENSI

- [1] I. N. 3 T. 2003 T. K. D. S. N. P. E-Government, "Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government," vol. 2004, pp. 1–3, 2004.
- [2] P. N. 6 T. 2011 Tentang, P. Umum, T. N. D. E. 011ngkungan I. Pemerintah, And Pemerintah, "Tentang, Permendagri Nomor 6 Tahun 2011 Umum, Pedoman Pemerintah, Tata Naskah Dlnas Elektronik 011ngkungan Instansi Pemerintah," 2008.
- [3] Sedarmayanti, "Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja," J. Wacana Ekon., vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2017.
- [4] D. Kusnadi and J. Ma'ruf, "Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Kelurahan Pringsewu Selatan," J. TAM (Technol. Accept. Model), vol. 5, no. 2, pp. 37–44, 2015.
- [5] T. Kutlu, "Implementasi Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (E-Office) Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Dki Jakarta," vol. 4, no. 1, pp. 88–100, 2023.
- [6] M. S. Siregar and S. Syakrani, "Implementasi Aplikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik (Sinde) Dalam Sistem Layanan Persuratan Di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan," AS-SIYASAH J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit., vol. 8, no. 2, p. 140, 2023, doi: 10.31602/as.v8i2.12122.

- [7] P. b. s. n. 46 t. 2018, Tentang, t. k. t. i. d. k. m. s. c. d. k. Sidoarjo, And N. Anggita, “Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menuju Smart City Di Kabupaten Sidoarjo,” 2018.
- [8] P. b. s. n. 30 t. 2020, Tentang, P. k. a. p. b. n. 29 T. 2010 t. t. n. Dinas, And d. l. p. k. Sidoarjo, “Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” Satukan Tekad Menuju Indones. Sehat, vol. 2015, 2020.
- [9] 2022) (Iqbal, “Jurnal Administrasi Publik,” Adm. Publik, vol. VIII, no. 8.5.2017, pp. 2003–2005, 2022.
- [10] A. Subarsono, “Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi),” vol. 133–136, 2011.
- [11] D. Isi, “Login Memberi Akses Surat Masuk (Khusus Admin OPD),” 2020.
- [12] E. K. S. E-buddy, S. Kasus, D. Kajeksan, K. Tulangan, and K. Sidoarjo, “Implementasi E-Government Melalui Naskah Dinas,” pp. 1–18, 2020.
- [13] Mukhammad Ulil Albab, Isna Fitria Agustina “Implementasi Pengelolaan Surat Dinas Berbasis Digital Melalui Aplikasi E-Buddy Sidoarjo di Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon”. 2023
- [14] D. Izza Nadila and I. Usrotin Choiriyah, “The Application E-Government Through The Sidoarjo Regency Electronic Office Letter Administration Application (E-Buddy) (Case study In Glagaharum Village, Porong District, Sidoarjo Regency) [Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Tata Surat Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) (Studi Kasus di Pemerintahan Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo)],” 2023.
- [15] Sugiyono., “Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d,” Metodol. penelitian. Bandung Alf., 2019.
- [16] M. dan Huberman, “Analisis Data Kualitatif,” Jakarta Univ. Indones. Press, p. 16, 1992.
- [17] F. D’Agostino, F. Ferrara, C. Gennarelli, R. Guerriero, and M. Migliozi, “Measurements corner: Efficient reconstruction of the pattern radiated by a long antenna from data acquired via a spherical-spiral-scanning near-field facility,” IEEE Antennas Propag Mag, vol. 56, no. 2, 2014, doi: 10.1109/MAP.2014.6837076.
- [18] T. D. Sekarningrum, S. S. N, and R. A. Adinda, “Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Desa Bumiaji Kota Batu,” JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 10, no. 3, 2021, doi: 10.33366/jisip.v10i3.2308.
- [19] E. N. Laili and I. U. Choiriyah, “Communication in The Elderly Family Development Program in Gresik Regency,” JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), vol. 9, no. 2, 2021, doi: 10.21070/jkmp.v9i2.1577.
- [20] E. Mandala, R. Setyadiharja, and J. Ri. R. Nurul Mulyani, “Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Studi Kasus di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kijang),” JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, vol. 1, no. 2, 2016, doi: 10.24905/jip.1.2.2016.247-264.
- [21] L. Fitrianingrum, D. Lusyana, and D. Lellyana, “Pengembangan Karier Jabatan Fungsional dari Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi: Analisis Implementasi dan Tantangan,” Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, vol. 14, 2020.
- [22] E. Edyanto, A. Agustang, A. Muhammad Idkhan, and R. Rifdan, “Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua,” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), vol. 5, no. 4, 2021, doi: 10.58258/jisip.v5i4.2577.
- [23] K. d. i. k. p. a. k. d. d. k. d. c. s. k. b. Mongondow And Hafis, “Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Hafis,” 1999.
- [24] P. humisar Parsaorantua, Y. Pasoreh, and sintje A. Rondonuwu, “Implementasi teknologi informasi dan komunikasi,” Acta Diurna, vol. VI, no. 3, pp. 1–14, 2017.
- [25] M. Achmad, Hamsah, and Nurkadarwati, “Implementasi Kebijakan Sistem E-Surat Dalam Mewujudkan EGovernment Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah,” J. Ilm. Adm. Pemerintah. Drh., vol. 13, no. 1, pp. 108–117, 2021.
- [26] I Putu Santika, I Ketut Mustika, and Ni Luh Kuni Hari, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan,” J. Appl. Manag. Stud., vol. 4, no. 1, pp. 24–36, 2022, doi: 10.51713/jamms.v4i1.58.

- [27] M. A. Datus Salam and B. Rosy, "Pengaruh Sarana Prasarana Dan Kualitas Pelayanan Administrasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Terhadap Kepuasan Masyarakat," *Publik J. Manaj. Sumber Daya Manusia, Adm. dan Pelayanan Publik*, vol. 9, no. 3, pp. 377–391, 2022, doi: 10.37606/publik.v9i3.360.
- [28] S. Di, D. Pekerjaan, U. Dan, and P. Ruang, "At Public Works And Spatial Planning Office Of Palangkaraya City Melakukan pelayanan kepada publik atau masyarakat merupakan salah satu tugas pokok Pelaksanaan tugas pokok pemerintah ini sejalan dengan isi Pasal 1 Ayat Tentang Administrasi Pemerintahan ya," vol. 49, no. 2, pp. 226–237, 2023, doi: 10.33701/jipwp.v49i2.3618.
- [29] A. Setiawan, "Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi," *Supremasi Huk. J. Kaji. Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 2, p. 117, 2021, doi: 10.14421/sh.v10i2.2313.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.